

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kinerja Organisasi

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan dinas yang memiliki tugas dan wewenang dalam hal urusan pemerintahan daerah bidang pertanian tanaman pangan berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 01 Tahun 2008. Salah satu yang menjadi urusan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah penyelenggaraan urusan pertanian tanaman pangan meliputi sumberdaya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura dan bina usaha.

Terkait dengan masalah lahan yang di alih fungsikan, pada tahun 2013 terdapat berbagai isu dan kekhawatiran oleh masyarakat terkait dengan kondisi lahan tidur (*Sleeping Line*) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, seperti semakin banyaknya lahan yang di alih fungsikan yang awalnya untuk lahan sawah menjadi lahan kebun atau lahan bangunan. Penanganan alih fungsi lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini pada dasarnya memerlukan koordinasi dengan pihak pemerintah, maka sesuai dengan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupaya mengatasi masalah tersebut dengan membuat peraturan perundang-undangan. Pemerintah memiliki dasar hukum yang digunakan untuk mengukur kinerja berdasarkan tugas dan fungsi dinas tersebut, dasar hukum yang digunakan akan disesuaikan dengan tugas pokok masing-masing dinas di setiap Kabupaten atau Kota.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 01 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Sedangkan landasan kebijakan terkait laju alih fungsi dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dilaksanakan berdasarkan :

- a. Undang-undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- b. Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

1. Produktivitas

Menurut Agus Dwiyanto Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektivitas pelayanan.¹ Dengan demikian,

¹ Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006 Hlm. 50

produktivitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja dari dalam organisasi, dalam hal mengatasi alih fungsi lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

a. Realisasi Program-Program Mengatasi Alih Fungsi Lahan

Produktivitas dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dari target dan realisasi program-program sesuai dengan rencana strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program dan kegiatan

No	Program	Pelaksanaan	Kegiatan
1	Sosialisasi pentingnya lahan sawah	Dua kali sosialisasi dalam satu tahun anggaran	Sosialisasi kelompok tani
		Satu kali pelatihan dalam satu tahun anggaran	Pelatihan memilih bibit unggul
2	Pemberian insentif kepada para petani	Satu kali Pemberian dalam satu tahun anggaran	Pemberian pupuk pestisida danbenih pada secara berkala
		Satu Kali Pemberian dalam satu tahun anggaran	Pemberian alat mesin traktor sejumlah 8 unit
3	Pelatihan manajemen jual beli dan pemanfaatan lahan	Dua kali Pembekalan dalam satu tahun anggaran	Pembekalan manajemen jual beli
		Dua kali pembekalan dalam satu tahun anggaran	Pembekalan pemanfaatan lahan sawah

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur 2016

Dari daftar program dan kegiatan seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura akan mengadakan berbagai program dalam mengatasi masalah alih fungsi lahan, implementasi program dan kegiatan tersebut dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan atau memperhatikan kondisi yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Table 3.2

Hasil Realisasi Program dan kegiatan

No	Program	Pelaksanaan	Kegiatan	Target		Realisasi	
				Capaian Program	Peserta	Capaian Program	Peserta
1.	Sosialisasi pentingnya lahan sawah	Dua kali sosialisasi dalam satu tahun anggaran	Sosialisasi kelompok tani	Masyarakat mampu memahami materi tentang pentingnya lahan sawah agar tidak di alih fungsikan	2 Kelompok tani (50 Orang)	Masyarakat mampu melaksanakan pencegahan adanya alih fungsi lahan sawah	2 Kelompok tani (50 Orang)
		Satu kali pelatihan dalam satu tahun anggaran	Pelatihan memilih bibit unggul	Masyarakat mampu memahami kualitas bibit unggul dalam bertani	2 Kelompok tani (50 Orang)	Masyarakat mampu memilih bibit unggul dalam bertani	2 Kelompok tani (50 Orang)

2	Pemberian insentif kepada para petani	Satu kali Pemberian dalam satu tahun anggaran	Pemberian subsidi harga pupuk pestisida secara berkala	Masyarakat mendapatkan subsidi pupuk pestisida sesuai anggaran yang diberikan	2 Kelompok tani (50 Orang)	Masyarakat mendapatkan subsidi pupuk petisida sesuai anggaran	2 Kelompok tani (50 Orang)
		Satu Kali Pemberian dalam satu tahun anggaran	Pemberian alat mesin traktor sejumlah 8 unit	Masyarakat mendapatkan subsidi mesin traktor sejumlah 8 unit	2 Kelompok tani (50 Orang)	Masyarakat mendapatkan subsidi mesin traktor sejumlah 8 unit	2 Kelompok tani (50 Orang)
3	Pelatihan manajemen jual beli dan pemanfaatan lahan	Dua kali Pembekalan dalam satu tahun anggaran	Pembekalan manajemen jual beli	Masyarakat dapat memahami manajemen jual beli hasil pertanian	2 Kelompok tani (50 Orang)	Sebagian masyarakat mampu memahami pembekalan materi tentang manajemen jual beli hasil pertanian, namun ada sebagian yang kurang memahami dikarenakan kurangnya pengetahuan dan minimnya pendidikan dari perindividu itu sendiri	2 Kelompok tani (50 Orang)

		Dua kali pembekalan dalam satu tahun anggaran	Pembekalan pemanfaatan lahan sawah	Masyarakat dapat memahami pentingnya pemanfaatan lahan sawah agar tidak terjadi alih fungsi lahan	2 Kelompok tani (50 Orang)	Masyarakat dapat memahami pembekalan tentang pentingnya pemanfaatan lahan sawah, namun ada sebagian yang kurang memahami dikarenakan kurangnya pengetahuan dan minimnya pendidikan dari perindividu itu sendiri	2 Kelompok tani (50 Orang)
--	--	---	------------------------------------	---	-----------------------------	---	-----------------------------

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya keseriusan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk memaksimalkan Perda No 18 Tahun 2013 tentang LP2B terbukti dengan adanya ketiga program diatas yaitu:

1. Program sosialisasi pentingnya lahan sawah

Program ini bertujuan untuk mencegah adanya alih fungsi lahan, dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan agar lahan-lahan yang telah ada tidak dialih fungsikan.

Tabel 3.3

Program Sosialisasi Pentingnya Lahan Sawah

NO	Kegiatan	Deskripsi	Target	Capaian
1	Sosialisasi Pentingnya Lahan Sawah	Sosialisasi lahan sawah adalah pelatihan untuk pengembangan pada peningkatan produktivitas lahan sawah	Seluruh kelompok tani ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini	Seluruh petani hadir dalam kegiatan ini
2	Pelatihan Memilih Bibit Unggul	Dalam pemilihan bibit unggul perlu dipahami seluruh petani agar memahami bagaimana bibit yang baik dalam produksi hasil tani	Agar seluruh kelompok tani bisa dapat memperoleh bibit unggul	Seluruh kelompok tani bisa menggunakan bibit unggul yang baik

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung

Timur

Untuk mengukur keberhasilan dari program tersebut peneliti melakukan wawancara dengan ketua kelompok tani Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Bapak Parlin pada (Tanggal 26 Desember 2016 pukul 14:30 WIB)

*“Ya memang ada petugas dari dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kepada kami untuk melakukan sosialisasi dengan membuat pertemuan antara kami dengan dinas terkait yaitu tentang pentingnya lahan pertanian pangan berkelanjutan”.*²

Dengan adanya wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura benar-benar serius menjalankan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai Perda no 18 tahun 2013.

2. Program pemberian insentif kepada para petani

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas lahan pertanian agar masyarakat khususnya petani tetap mempertahankan lahan tersebut sebagai lahan pertanian agar tidak di alih fungsikan.

² Hasil wawancara dengan Parlin selaku ketua kelompok tani Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 26 Desember 2016.

Tabel 3.4

Program Pemberian Insentif Kepada Petani

NO	Kegiatan	Deskripsi	Target	Capaian
1	Pemberian subsidi harga pupuk pestisida secara berkala	Pemberian subsidi pupuk pestisida secara berkala bertujuan agar mempermudah masyarakat dalam kegiatan pertanian untuk memperoleh pupuk	Agar pemberian subsidi pupuk pestisida dapat merata keseluruhan kelompok tani	Seluruh kelompok tani dapat menikmati pemberian subsidi pupuk pestisida
2	Pemberian alat mesin traktor sejumlah 8 unit	Pemberian traktor bertujuan untuk mempercepat proses kegiatan dalam pengolahan lahan sawah	Pemberian alat mesin traktor dapat digunakan dalam mengolah lahan sawah sebaik mungkin	Masyarakat kelompok tani dapat mengolah lahan sawah dengan efektif dan efisien

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Parlin Pada
(Tanggal 26 Desember 2016 pukul 14:30 WIB)

“Memang benar kami para petani mendapatkan insentif berupa subsidi harga pupuk yang di berikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, kami sebagai petani sangat merasa terbantu dengan adanya subsidi tersebut sehingga produktifitas hasil panen kami lebih meningkat, namun masih ada salah satu kecamatan yang belum tersalurkan pemberian insentif satu unit mesin traktor untuk sawah dikarenakan pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura memberitahu kami bahwa masih ada kendala dana pada pengadaan program tersebut ”³

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa adanya program pemberian insentif ini sangat-sangat membantu bagi para petani sehingga petani tetap mempertahankan lahan tersebut agar tidak di alih fungsikan, namun masih kurangnya pemberian insentif satu unit mesin traktor pada satu kecamatan dikarenakan terjadinya kendala dana pada saat berjalannya program tersebut, namun setelah peneliti konfirmasi kepada pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur membenarkan adanya kendala dalam menjalankan program tersebut seperti yang dikatakan oleh Bapak Yosrial selaku Kepala Bagian Administrasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanggal 28 Desember 2016 pukul 11:00 WIB)

“Ya kita dari pihak dinas memang mengalami kendala saat menjalankan program pemberian insentif berupa 8 unit mesin traktor, dari 9 kecamatan hanya 8 kecamatan yang baru diberikan mesin traktor dengan 1 kecamatan 1 unit mesin traktor, dalam hal ini kami pihak dinas lagi berupaya untuk memaksimalkan agar dana untuk mengadakan 1 unit mesin traktor lagi akan turun dari pihak pemerintah pusat ”⁴

³ Hasil wawancara dengan Parlin selaku Ketua Kelompok Tani Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 26 Desember 2016.

⁴ Hasil wawancara dengan Yosrial selaku Kepala Bagian Administrasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 20 Desember 2016.

Dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sedang bersungguh-sungguh mengupayakan dana untuk memberikan satu unit mesin traktor lagi untuk satu kecamatan sehingga program yang dijalankan sesuai dengan target pencapaian.

3. Program Pelatihan manajemen jual beli dan pemanfaatan lahan

Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan terhadap petani yang mempunyai lahan sawah untuk memaksimalkan agar dapat memajukan para petani dan meningkatkan perkonomian para petani.

Tabel 3.5

Program Pelatihan Manajemen Jual Beli dan Pemanfaatan Lahan

NO	Kegiatan	Deskripsi	Target	Capaian
1	Pembekalan manajemen jual beli	Pembekalan manajemen jual beli agar masyarakat paham mengenai bagaimana sistem manajemen operasional yang baik maupun jual beli secara langsung	Agar masyarakat memahami dan bisa melakukan transaksi jual beli secara langsung	Masyarakat kelompok tani lebih mandiri dalam proses jual beli secara langsung
2	Pembekalan pemanfaatan lahan sawah	Pembekalan pemanfaatan lahan sawah bertujuan agar masyarakat peduli terhadap pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan lahan sawah	Masyarakat mampu mengenali pemanfaatan lahan sawah berkelanjutan	Masyarakat kelompok tani lebih produktif dalam mengelola lahan sawah dan memanfaatkan secara baik

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dalam wawancara terhadap bapak parlin (Tanggal 26 Desember 2016
pukul 14:30 WIB)

“Ya memang ada dari pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mengundang kami untuk menghadiri acara pelatihan manajemen jual beli dan pemanfaatan lahan agar kami para petani dapat memaksimalkan hasil panen yang kami dapatkan dan dapat konsisten dalam melindungi lahan agar tidak dialih fungsikan”⁵

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya program ini, dapat membantu dalam menjalankan peningkatan ketahanan pangan, demi tetap memastikan konsistensi para petani agar tidak terjadi pengalih fungsian lahan. Program-program tersebut diharapkan mampu mengurangi jumlah laju alih fungsi lahan, pelaksanaan program untuk mengurangi alih fungsi lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga sebaiknya dilakukan secara berkala sehingga presentase keberhasilannya dapat dikatakan berhasil, mengingat beberapa program tersebut pelaksanaan dan kegiatannya hanya berdasarkan pada kondisi yang terjadi pada titik-titik lahan yang di alih fungsikan saat kondisi atau situasi tertentu, seperti yang disampaikan oleh bapak Maushul, selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Tanggal 20 Desember 2016 pukul 14:30)

⁵ Hasil wawancara dengan Parlin selaku Ketua Kelompok Tani Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 26 Desember 2016.

“Untuk melaksanakan sosialisasi program lahan pertanian pangan berkelanjutan ini dilakukan secara situasional, tergantung keadaan, situasi dan kondisi tertentu, misalnya saat jam para petani tidak bertani maupun sedang menanam padi dan membajak sawah. Setiap 6 bulan sekali kami selalu mengevaluasi dan melakukan penanganan bekerja sama dengan Stakeholder yang berkaitan”⁶

Pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan para kelompok tani saling bekerja sama dalam melaksanakan program lahan pertanian pangan berkelanjutan agar terciptanya kesejahteraan bagi para petani.

Dari aspek produktivitas di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dari target dan realisasi program-program sesuai dengan rencana strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016. Untuk realisasi program dalam mengatasi alih fungsi lahan terdapat tiga program yang di selenggarakan yaitu Sosialisasi Pentingnya Lahan Sawah, Pemberian Insentif Kepada Para petani, dan Pelatihan Manajemen Jual Beli dan Pemanfaatan Lahan, dari ketiga program tersebut semua program tercapai dengan hasil 85% karena terdapat kendala dalam pemberian insentif kepada para petani karena dalam pemberian mesin traktor untuk 9 kecamatan hanya terealisasikan sebanyak 8 unit saja dikarenakan terjadinya kendala dana pada saat berjalannya program tersebut setelah peneliti konfirmasi kepada pihak

⁶ Hasil wawancara dengan Maushul Selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 20 Desember 2016.

Dinas. Selanjutnya kendala terjadi pada program pelatihan manajemen jual beli dan pemanfaatan lahan karena dalam program tersebut masih ada sebagian peserta yang kurang memahami pembekalan materi tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan minimnya pendidikan dari perindividu itu sendiri.

b. Kesesuaian Hasil Dengan Target

Setiap program dan kegiatan memang memerlukan koordinasi dengan pihak lain atau instansi lain guna mendapatkan hasil sesuai dengan target yang diharapkan, keterkaitan oleh beberapa instansi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas. Keberhasilan dan perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada bidang Pertanian mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat.

Tabel 3.6**Hasil Pencapaian**

No	Program	Pelaksanaan	Target	Kegiatan	Realisasi (%)
1	Sosialisasi pentingnya lahan sawah	Dua kali sosialisasi dalam satu tahun anggaran	100%	Sosialisasi kelompok tani	90%
		Satu kali pelatihan dalam satu tahun anggaran	100%	Pelatihan memilih bibit unggul	90%
2	Pemberian insentif kepada para petani	Satu kali Pemberian dalam satu tahun anggaran	100%	Pemberian pupuk pestisida danbenih pada secara berkala	90%
		Satu Kali Pemberian dalam satu tahun anggaran	100%	Pemberian alat mesin traktor sejumlah 8 unit	85%
3	Pelatihan manajemen jual beli dan pemanfaatan lahan	Dua kali Pembekalan dalam satu tahun anggaran	100%	Pembekalan manajemen jual beli	90%
		Dua kali pembekalan dalam satu tahun anggaran	100%	Pembekalan pemanfaatan lahan sawah	90%

Sumber: LAKIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Berkat kebijakan program pembangunan pertanian dan langkah-langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan penghargaan

Satya Lencana Pembangunan Bidang Pertanian, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Maushul selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Tanggal 23 November 2016 Pukul 11:00 WIB)

“Apa yang ditargetkan sudah berhasil, karena persentase hasil yang didapat sudah hampir masuk dalam kategori berhasil sesuai target yang diinginkan, maka dari itu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun 2016 mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat berupa Satya Lencana Pembangunan Bidang Pertanian, karena adanya kerjasama antara masyarakat petani dengan Pemerintah Kabupaten”⁷

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pemberian penghargaan tersebut telah sesuai dengan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jelas disebutkan, yaitu Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan sektor jasa lainnya.

Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak Parlin selaku ketua kelompok tani Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengatakan bahwa dengan adanya seluruh program-program yang diadakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura itu sangat berdampak baik bagi kesejahteraan

⁷ Hasil wawancara dengan Maushul Selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 20 Desember 2016.

masyarakat khususnya para petani sehingga paham akan situasi yang dihadapi maupun mencegah terjadinya alih fungsi lahan yang semakin meningkat.⁸

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa untuk pencapaian kesesuaian hasil dengan target dapat disimpulkan bahwa pencapaian sudah berhasil karena pihak dinas mengatakan bahwa persentase hasil yang didapat sudah hampir masuk dalam kategori berhasil sesuai target yang diinginkan, hal ini ternyata benar-benar direalisasikan dengan berbagai bentuk kebijakan dan program Pembangunan Bidang Pertanian dan dituangkan dalam konsepsi kebijakan seperti meningkatnya produktivitas komoditi pertanian pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan kehutanan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah serta tersebar di kawasan sentra produksi. Selain itu, Pemkab Tanjung Jabung Timur juga merupakan kabupaten pertama se-Provinsi Jambi yang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal tersebut merupakan wujud dari keseriusan Pemkab dalam rangka mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 17.000 Ha dan lahan cadangan pangan seluas paling kurang 4.000 Ha.

⁸ Hasil wawancara dengan Parlin selaku Kepala Kelompok Tani Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 23 November 2016.

2. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan menjadi sangat penting untuk menjadi indikator penilaian kinerja sebuah organisasi, sudah menjadi tanggung jawab organisasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam penelitian ini peneliti menekankan aspek-aspek yang berada dalam lingkup kajian penelitian ini diantaranya adalah :

a. Tangibles (Bukti Fisik)

Tangibles (bukti fisik) sebagai keberadaan fisik dari penyedia pelayanan, yaitu :

1) Tempat parkir

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, ditemukan bahwa adanya lokasi parkir yang digunakan untuk pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Kapasitas daya tampung kendaraan bermotor di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan ukuran lahan 30x10 m² yang dapat menampung sejumlah:

Tabel 3.7

Jenis Kendaraan Berdasarkan Tempat Parkir

NO	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Kendaraan Roda Empat (Mobil)	3 Unit
2	Kendaraan Roda Dua (Motor)	25 Unit

Sumber : Berdasarkan RENSTRA Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Gambar 3.1
Tempat Parkir



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dari dokumentasi pribadi tersebut diketahui bahwa lokasi parkir terlihat rapi tetapi belum cukup luas untuk menampung kendaraan masyarakat yang datang ke Dinas, maka dari itu perlu nya tambahan ruang parkir yang luas sehingga bisa menampung lebih banyak kendaraan yang ada di dinas pertanian tersebut agar dapat membantu proses pelayanan yang ada di area dinas, seperti yang dikatakan oleh Ibu Fatma selaku masyarakat penerima pelayanan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanggal 20 Desember 2016 pukul 11:30 WIB)

“Sejauh ini pelayanan parkir yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sudah cukup baik, namun sebaiknya ada tambahan sarana dan prasarana seperti pelayanan tempat parkir, dan

keamanan berupa petugas parkir sehingga kami penerima pelayanan bisa nyaman”⁹

Dari hasil wawancara diatas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa fasilitas parkir sudah cukup mampu memberikan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat namun masih ada kekurangan pada aspek sarana dan prasarana . Ditambahkan lagi oleh pap Dedy selaku staff di bagian sarana dan prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mengakui bahwa pelayanan publik berupa tempat parkir masih belum maksimal mengingat anggaran dana yang belum di disosisikan pada sarana parkir.¹⁰

2) Fasilitas gedung

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tersebut memiliki fasilitas gedung seperti ruang rapat yang digunakan oleh pegawai dinas.

⁹ Hasil wawancara dengan Fatma selaku masyarakat Petani Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 20 Desember 2016

¹⁰ Hasil wawancara dengan Dedy selaku staff Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 20 Desember 2016.

Tabel 3.8
Fasilitas Gedung

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Tanah/Gedung	24.000 m ²
2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Unit
3.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Unit
4.	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional roda 4 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional roda 2	2 Unit 24 Unit
5.	Bibit padi unggul	2 Ton
6.	Fasilitasi pupuk dan Pestisida	200 botol/Kecamatan
7.	Mesin Ketik	10 buah
8.	Meja Kerja	54 buah
9.	Kursi Kerja	50 buah
10.	Kursi Putar	14 buah
11.	Lemari Kayu	20 buah
12.	Lemari Besi	10 buah
13.	TV	3 buah
14.	Jam Dinding	5 buah
15.	LCD	3 buah
16.	Brankas	5 buah
17.	Sound	2 buah
18.	Mocrofon	3 buah
19.	Kamera	3 buah
20.	Filing Cabinet	3 buah

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dari aspek tangible dimana fasilitas gedung yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura masih kurang representatif, mengingat kondisi gedung yang digunakan masih minim dari fasilitas yang ada, namun semua kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh dinas dalam

menunjang pelaksanaan kinerja bisa dilakukan oleh semua bidang dan aparaturnya di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Dedy selaku staff bidang sarana dan prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Tanggal 20 Desember 2016. Pukul 12:30 WIB)

“Fasilitas gedung yang kita punya memang relatif belum nyaman, dalam arti beberapa fasilitas kinerja belum representatif seperti jumlah ruangan dan fasilitas IT, Meja dan Kursi, tapi semua tugas dan fungsi dari masing-masing bidang bisa terlaksana dengan baik”¹¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa fasilitas gedung di dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sudah cukup memadai akan tetapi masih ada beberapa yang kurang dikarenakan masih adanya perbaikan dari pihak dinas itu sendiri, hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu Aminah selaku Customer Service, memang fasilitas gedung yang kita miliki saat ini masih kurang nyaman terlihat dari gedung yang masih sempit dan juga kapasitas gedung yang kurang sesuai, namun pelayanan kepada masyarakat tetap diberikan secara maksimal.¹²

¹¹ Hasil wawancara dengan Dedy selaku staff bidang sarana dan prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 20 Desember 2016.

¹² Hasil wawancara dengan Aminah selaku Customer Service Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 20 Desember 2016.

Gambar 3.9
Fasilitas Gedung



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dari foto diatas terlihat bahwa dinas tersebut memiliki ruang rapat yang minimalis dan sederhana. Oleh sebab itu perlu nya tambahan beberapa fasilitas lain seperti sofa agar bisa menunjang kinerja pegawai dalam melakukan pekerjaan ataupun rapat sehingga karyawan mendapatkan kenyamanan dalam setiap agenda rapat yang di selenggarakan.

3) Tata letak dan tampilan barang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan, peneliti mendokumentasikan tata letak dan tampilan barang pada ruang pertemuan kepala Bidang di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Gambar 3.3

Tata Letak dan Tampilan Barang



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dari foto tersebut dapat terlihat bahwa tata letak dan tampilan barang ruang pertemuan kepala bidang pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tersebut terlihat rapi dan sederhana, secara tata letak dan tampilan barang pada aspek tangibles yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan dimana fasilitas tata letak dan tampilan barang sudah sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kinerja dari aparatur dinas tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Maushul selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Tanggal 20 Desember 2016 Pukul 11:00 WIB)

“Sarana dan prasarana yang kita miliki itu di tempat rapat itu tata letak dan tampilan barangnya sudah kita buat sesuai dengan kebutuhan dari dinas ini, baik dari tata letak dan tampilan barang di ruang rapat maupun ruang khusus penerimaan tamu, namun memang tidak semua tata letak dan tampilan barang ini sesuai yang ada disetiap ruangan yang seharusnya itu menjadi kebutuhan dari masing-masing ASN”¹³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam aspek tata letak dan tampilan barang sudah sangat tertata dan hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Mulyani selaku staff Bagian Pengelolaan Data bahwa memang fasilitas berupa tata letak dan tampilan barang yang kita punya itu memang lebih kita tampilkan pada ruangan atau tempat sesuai dengan yang menjadi kebutuhan prioritas seperti ruang rapat dan pertemuan.¹⁴

4) Kenyamanan fasilitas fisik

Berdasarkan penelitian dilapangan, peneliti mendokumentasikan kondisi penyediaan ruang pelayanan seperti untuk memberikan kenyamanan berupa fasilitas fisik kepada pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura ataupun masyarakat yang mengunjungi Dinas tersebut.

¹³ Hasil wawancara dengan Maushul selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 20 Desember 2016.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Mulyani selaku staff Bagian Pengelolaan Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 20 Desember 2016.

Gambar 3.4

Kenyamanan Fasilitas Fisik



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dari foto diatas dapat diketahui bahwa kenyamanan fasilitas fisik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tersebut cukup terpenuhi seperti adanya pendingin ruangan, televisi, kursi, meja dll yang dapat digunakan serta ruangan tersebut terlihat bersih., namun belum cukup baik mengingat beberapa fasilitas sarana pendukung belum semua terpenuhi. Hal ini disampaikan oleh Eko Cahyanto selaku staff bidang sarana dan prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanggal 20 Desember 2016. Pukul 12:30 WIB).

“Memang sejauh ini kenyamanan fasilitas fisik menjadi salah satu kendala bagi kami sebagai aparatur untuk melaksanakan tugas dan

fungsi, karena tidak dipungkiri kebutuhan kenyamanan fasilitas fisik menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang kinerja yang kami lakukan”¹⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kenyamanan fasilitas fisik sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja SDM agar nyaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sudah sangat menciptakan kenyamanan fasilitas fisik bagi para ASN di dalamnya.

5) Peralatan dan perlengkapan modern.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mendokumentasikan peralatan dan perlengkapan modern yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Eko Cahyanto selaku staff bidang sarana dan prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 20 Desember 2016.

Gambar 3.5

Peralatan dan Perlengkapan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dari dokumentasi pribadi tersebut, didapatkan informasi bahwa adanya komputer, printer, faxmail dan lain- lain pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tersebut yang dapat digunakan oleh pegawai Dinas tersebut, dan berdasarkan kebutuhan pada aspek peralatan dan perlengkapan sejauh ini yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sudah cukup representatif namun belum maksimal, karena ada beberapa fasilitas yang seharusnya mampu mendukung lebih efektif kerja karena memang belum mumpuni baik aparturnya maupun yang lainnya sehingga beberapa peralatan dan perlengkapan yang dimiliki dinas belum sepenuhnya dilaksanakan dengan maksimal, sebagaimana disampaikan oleh

Bapak Eko Cahyanto selaku staff bidang sarana dan prasarana dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanggal 20 Desember 2016. Pukul 12:50 WIB).

”Memang fasilitas yang kita miliki berupa peralatan dan perlengkapan sejauh ini sudah cukup membantu, namun memang fasilitas penunjang lainnya masih kita butuhkan seperti komputer yang terhubung langsung semuanya dengan koneksi internet yang belum maksima, pada intinya kami membutuhkan peralatan dan perlengkapan yang lebih inovatif lagi sehingga bisa dilaksanakan semua kebutuhan dari dinas ini lebih efektif dan efisien bisa terlaksana dengan baik”¹⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari aspek peralatan dan perlengkapan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah cukup mumpuni, hanya saja harus lebih ditingkatkan lagi peralatan dan perlengkapan yang lebih inovatif agar aksesnya lebih mudah.

Dari aspek kualitas pelayanan terdapat tiga bagian didalamnya yaitu tangibles (bukti fisik), responsibilitas dan access (menyediakan layanan yang mudah untuk dihubungi). Untuk aspek tangibles dalam bukti fisik penyedia layanan yaitu menyediakan lahan parkir yang luas, lokasi parkir yang digunakanpun mampu menampung 25 unit kendaraan roda dua dan 3 unit kendaraan roda empat, namun masih belum cukup luas untuk menampung

¹⁶ Hasil wawancara dengan Eko Cahyanto selaku staff bidang sarana dan prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 20 Desember 2016.

kendaraan roda dua yang diketahui banyak pegawai yang memakai kendaraan roda dua tersebut. Untuk aspek fasilitas gedung sendiri pihak dinas mengatakan bahwa dinas ini memiliki fasilitas gedung yang memadai namun perlu adanya tambahan barang seperti sofa untuk kenyamanan para pegawai. Untuk aspek tata letak dan tampilan barang juga sudah cukup memuaskan karena sudah terlihat rapi dan sederhana. Untuk aspek kenyamanan fasilitas fisik juga sudah cukup terpenuhi. Dan terakhir untuk aspek peralatan dan perlengkapan modern pun didapatkan informasi bahwa adanya komputer, printer, faxmail dan lain-lain pada dinas tersebut sudah cukup memadai dan dapat digunakan oleh pegawai Dinas tersebut.

b. Responsibilitas

Menurut Agus Dwiyanto responsivitas merupakan indikator kinerja yang berorientasi kepada proses, responsivitas ini dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁷

Aspek responsibilitas mencakup kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip baik secara implisit

¹⁷ Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, Hlm.50.

maupun eksplisit. Dalam aspek ini, kinerja organisasi publik dinilai semakin baik apabila kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi, peraturan dan kebijakan organisasi.

Terkait dengan aspek tanggung jawab Dinas pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dari adanya rencana strategis untuk pedoman/landasan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan aparaturnya untuk menyusun rencana kerja (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) serta tersedianya rumusan strategi kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif dan menjadi pedoman serta tolak ukur dalam penilaian dan akuntabilitas kinerja SKPD yang bersangkutan di dalam mewujudkan visi dan misi disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, mengenai kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini juga didukung keterangan dari Bapak Harsono, yang menyatakan dalam setiap kebijakan atau program kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai dasar dan perencanaan, pelaksanaan kebijakan.¹⁸

¹⁸ Hasil wawancara dengan Harsomo selaku Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 20 Desember 2016.

Menurut penulis, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah sesuai dengan prinsip responsibilitas dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada baik dalam penyusunan anggaran maupun dalam upaya mewujudkan *good governance*. Hal ini dibuktikan dengan adanya Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai bentuk pertanggung jawaban sebagai aparatur yang membantu Kepala Daerah di bidang Pertanian dan Tanaman Pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program kerja yang lebih berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta dalam rangka mewujudkan *good governance*.

1. Menanggapi Kebutuhan dan Keinginan Masyarakat

Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidaklarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi tersebut, organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang buruk pula. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam membuat program guna mengurangi alih fungsi lahan selalu berupaya untuk mengenali apa saja yang menjadi

kebutuhan masyarakat dan para petani, lalu menyusun agenda dengan mengangkat isu-isu permasalahan yang terjadi, kemudian melakukan penanganan sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti yang disampaikan oleh bapak Erdison selaku Kepala Bidang Sarana, Prasarana, Pengelolaan & Pemasaran (Tanggal 24 Desember 2016 pukul 16.00 WIB)

“Kita itu sebagai unsur pemerintahan yang bertugas melayani masyarakat khususnya di bidang pertanian ini tentu dalam melakukan kegiatan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat maupun para petani, kebutuhan itu misalnya mengenai kelancaran bertani, memanen dan bercocok tanam diawali dengan mereka melakukan musrenbang musyawarah rencana pembangunan dari tingkat kelurahan, lalu tingkat kecamatan sampai dengan kota, didalam musrenbang itu masyarakat kemudian menyampaikan segala macam program yang dibutuhkan, tentu jika program dan kegiatan itu berada didalam ranah kewenangan dinas pertanian maka kemudian dinas pertanianlah yang akan menindaklanjuti, contohnya, masyarakat membutuhkan adanya alat untuk pengolahan lahan dan air di kelurahan, maka ini akan dibawa ke musrenbang kelurahan, kemudian naik ke musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten. Biasanya kami itu diundang dalam musrenbang-musrenbang tersebut sehingga kami juga bisa menangkap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk kemudian kita gunakan sebagai acuan dalam kemudian kita membuat kegiatan, sebab kegiatan memberikan segala insentif tersebut berdasarkan kebutuhan dari masyarakat, sehingga prosesnya dengan masyarakat melalui musrenbang”¹⁹

¹⁹ Hasil wawancara dengan Erdison selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 20 Desember 2016.

Bapak Erdison juga menambahkan apabila ada laporan masyarakat yang mengeluhkan kualitas dari fasilitas yang telah disediakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mengalami kerusakan atau gangguan maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuka nomor telepon yang dapat dihubungi untuk keluhan tersebut.

“Dengan membuka adanya nomor telepon yang bisa di hubungi seandainya terjadi permasalahan di lapangan, misalnya ada keluhan para masyarakat atau para petani mengenai keluhan-keluhan maka kita akan segera melakukan tindakan penanganan, jadi ada sop-sop terkait itu”²⁰

Terkait dengan layanan pengaduan tersebut, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur dinilai lamban dalam mengatasi masalah yang terjadi dilapangan, hal tersebut disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia atau personil lapangan yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Dari aspek responsibilitas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sudah sangat menanggapi kebutuhan dan keinginan masyarakat, terlihat jelas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam membuat program guna mengurangi alih fungsi lahan selalu berupaya untuk mengenali apa saja

²⁰ Hasil wawancara dengan Erdison selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 20 Desember 2016.

yang menjadi kebutuhan masyarakat dan para petani, lalu menyusun agenda dengan mengangkat isu-isu permasalahan yang terjadi, kemudian melakukan penanganan sesuai dengan prosedur yang ada.

c. Access (Menyediakan Layanan Yang Mudah Dihubungi)

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini telah menyediakan akses yang memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dengan pemerintah khususnya pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur beberapa diantaranya akses fasilitas yang disediakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

1. Telepon & Fax akses (0740) 7370053
2. Website

Dalam aspek acces ini peneliti telah mewawancarai satu narasumber sebagai penerima pelayanan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu ibu Mardiah selaku masyarakat yang menerima pelayanan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tersebut (Tanggal 23 Desember 2016. Pukul 16:00 WIB) bahwasannya :

“Saya selaku penerima pelayanan dan yang selalu berurusan dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merasa

pelayanan Dinas ini sangat transparan dan sangat mudah, khususnya bila ingin mengirimkan proposal atau kritik dan saran melalui email resmi dinas maupun web resmi dinas selalu ditanggapi dengan baik sehingga apapun urusannya selalu terbuka dan dipermudah”²¹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura khususnya pada media online sudah cukup transparan dan sangat dipermudah dalam mengakses apapun yang dibutuhkan masyarakat khususnya petani.

Gambar 3.6

Website Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber: Dokumentasi Pribadi

²¹ Hasil wawancara dengan Mardiah selaku Masyarakat Petani Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 23 Desember 2016.

3. Email (pertanian@tanjabtimkab.go.id)

Untuk aspek akses atau dalam menyediakan layanan yang dapat dihubungi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sangat transparan dalam melayani apapun masukan atau keluhan yang terdapat pada masyarakat untuk lebih di pahami guna kelancaran program yang lebih baik kedepannya, akses fasilitas tersebut disediakan untuk masyarakat agar dapat memudahkan hubungannya dengan pemerintah.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Dalam pelaksanaan Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat faktor yang mempengaruhi suatu proses berjalannya program tersebut. Dalam hal ini perlu di ulas apa-apa saja yang berpengaruh mengenai berjalannya proses program tersebut. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut yaitu :

1. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di dalam LP2B sebagai pelaku yang menjalankan aktivitas pada hubungan internal terlaksanakannya program tersebut. Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Akhmad Maushul Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura(Tanggal 16 November 2016 pukul 11:00 WIB)

“Selama pelaksanaan program LP2B ini, kita tentunya mencari seluruh alokasi dan mempersiapkan data luas lahan tanaman pangan, kemudian data kelompok tani, data lokasi atau desa untuk diajukan dalam proses pembahasan rapat lanjutan di DPRD.”²²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menganalisa bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura turun langsung ke seluruh kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mempersiapkan seluruh data dan pemetaan lahan yang akan digunakan untuk pengalokasian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dari 9 Kecamatan yang terdaftar dalam Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menunjukkan jumlah total luas lahan seluas 17.001,49 Ha (*data terlampir*). Penjelasan tersebut di paparkan oleh Bapak Akhmad Maushul selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

“Untuk Penilaian terhadap indikator pencapaian ini dilaksanakan pada setahun sekali selalu dilaksanakan, dan nanti akan dievaluasi lagi pertahun dan hasilnya bisa berkurang dan bertambah. Karena di daerah program LP2B ini terdapat banyaknya Sleeping Line atau biasa disebut lahan tidur, yaitu lahan yang tidak terpakai atau lahan yang menganggur.”²³

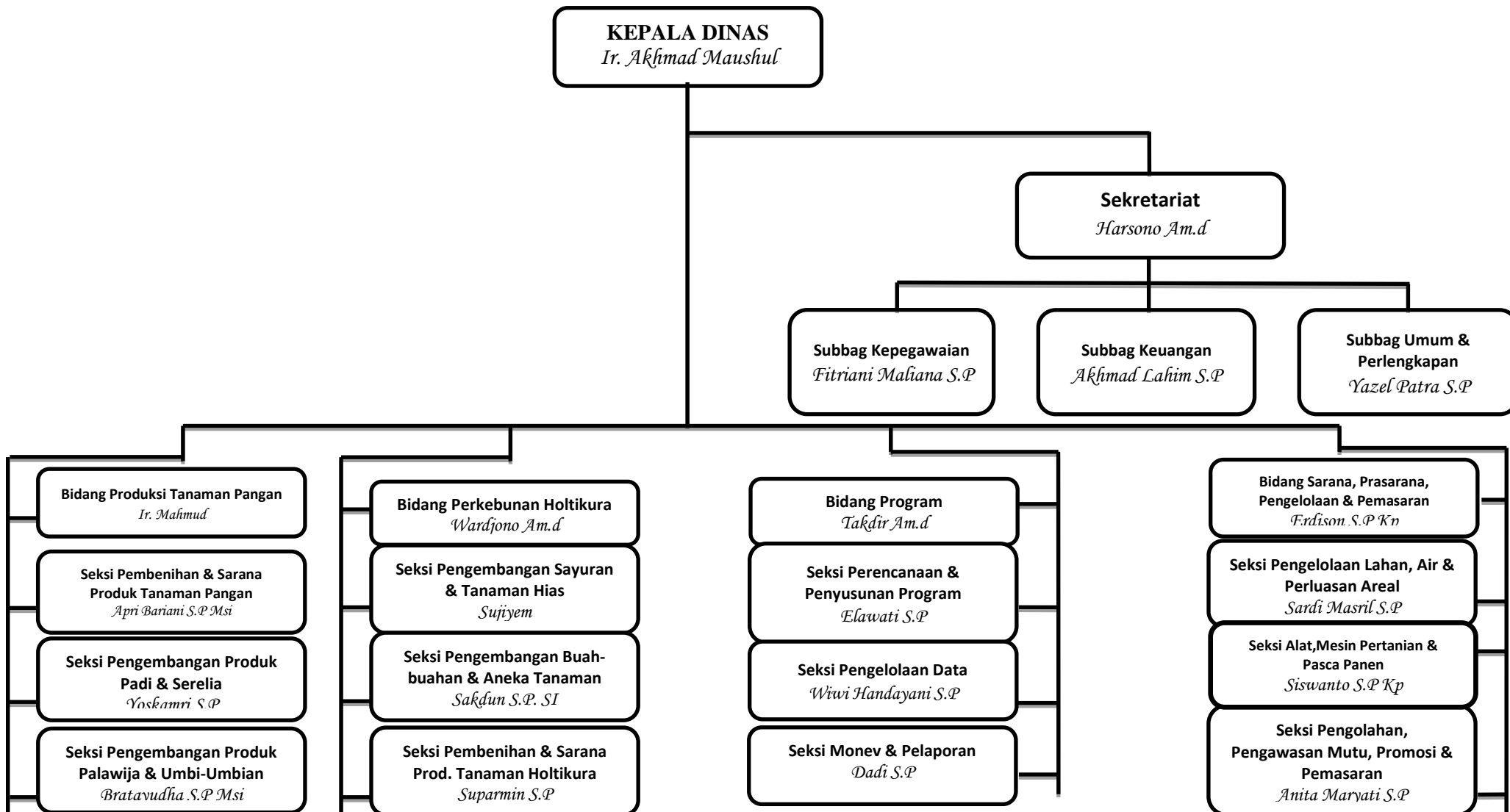
²² Hasil wawancara dengan Ir. Akhmad Maushul Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan . Tanggal 16 November 2016.

²³ Hasil wawancara dengan Ir. Mahmud selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Tanggal 18 November 2016.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura berusaha konsisten dalam menjalankan program karena dilihat dari penilaian terhadap indikator pencapaian ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan pada setahun sekali selalu dilaksanakan, dan nanti akan dievaluasi lagi pertahun dan hasilnya bisa berkurang dan bertambah. Dikarenakan masih banyak nya terdapat *Sleeping Line* atau lahan yang menganggur dan perlunya pemberdayaan lahan tersebut agar bisa dialih fungsikan menjadi lahan yang lebih bermanfaat terhadap Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sehingga program pelaksanaan yang dilaksanakan setahun sekali bisa mendapat hasil yang lebih baik dengan adanya pemanfaatan lahan yang tidak terpakai tersebut.

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura



2. Kebijakan

Pada Perda No 18 Tahun 2013 ini ditetapkanlah 9 lokasi yang menjadi target perlindungan LP2B. Dalam melakukan tugasnya petugas melaksanakan tugas dilapangan dalam waktu tiga bulan sekali semua laporan yang telah didata dari setiap lahan dari tingkat Desa dan Kecamatan harus sampai kepada petugas pihak Kabupaten. Adapun untuk menentukan nilai suatu kebijakan itu dari bukti atau fakta, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mengakui bahwa bukti atau fakta adalah untuk menentukan nilai suatu kebijakan, dan kebijakan yang dibuat terbukti dapat memecahkan masalah tersebut. Parlin mengatakan bahwasannya pentingnya Perda terkait dengan Perlindungan LP2B. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Akhmad Maushul Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Tanggal 16 November 2016 pukul 11:00 WIB)

*“Kebijakan pengelolaan yang diterapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu berpedoman pada Perda No 18 Tahun 2013 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang didalamnya mencakup tentang pengelolaan LP2B”.*²⁴

Peneliti mendapatkan informasi dari perda No 18 Tahun 2013 yang didalamnya telah ditetapkan 9 lokasi yang menjadi target perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mencakup 17.000 ha lahan sawah plus 4000 ha lainnya sebagai cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas dilapangan, petugas yang terlibat berupaya untuk pendataannya dilakukan dalam beberapa bulan setelah musim tanam tiba bagi di tingkat desa dilakukan setiap satu bulan sekali, untuk tingkat kecamatan menerima laporan dari petugas desa dalam dua bulan sekali, dan untuk tingkat kabupaten menerima laporan

²⁴ Hasil wawancara dengan Maushul selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 16 N9vember 2016.

dari petugas kecamatan dalam tiga bulan sekali. Tiga bulan sekali laporan itu harus sampai kepada petugas pihak Kabupaten. Akhmad Maushul pun menambahkan bahwasannya dengan adanya Perda ini sangat membantu sekali seperti wawancara berikut:

“Sangat membantu sekali atas apa yang pemerintah buat yaitu Peraturan Daerah NO 18 Tahun 2013, karena selama ini apa yang di tuangkan dalam perda tersebut adalah masalah petani dan bisa ditanggulangi olah adanya Perda tersebut, jika sebelum Perda tersebut keluar biasanya tanam padi hanya satu tahun sekali, sekarang bisa mencapai dua kali setahun dalam menanam padi.”²⁵

Dengan adanya program ini seluruh aspek telah di persiapkan dengan matang hingga program ini berjalan dengan lancar, walaupun disetiap program tidak menutup kemungkinan adanya hal yang membuat program itu mempunyai kendala tersendiri namun hal itu pasti bisa didapatkan suatu solusinya. Hal ini menjadi sebuah acuan untuk pemerintah agar bisa bekerja dengan sebaik dan semaksimal mungkin kedepannya agar mendapatkan hasil dan tujuan yang diinginkan. Sehingga program yang telah dilaksanakan bisa lebih efektif dalam memperoleh hasil yang diinginkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rencana strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2016, penulis mengetahui bahwa jumlah dan kualitas sebagian SDM Aparatur Dinas masih terbatas, berdampak kepada kinerja yang masih relatif rendah, maka dari itu perlu adanya tambahan SDM agar kinerja bisa lebih produktif. Begitu pula dengan jumlah dan kualitas SDM masyarakat/petani

²⁵ Hasil wawancara dengan Parlin selaku Kepala Kelompok Tani Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 23 November 2016.

yang masih rendah dapat menghambat proses adopsi teknologi yang dianjurkan dan menghambat pengembangan usaha ekonomi pertanian. Peneliti juga mewawancarai Bapak Harsono selaku Sekretaris di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanggal 24 Desember 2016. Pukul 13:30 WIB) bahwasannya:

“Dalam hal sumber daya manusia kami menyadari bahwa masih kurangnya etos kerja dan budaya memupuk modal masyarakat petani yang memperhambat jalan nya program-program yang sudah dijalankan, maka dari itu kami sering mengadakan sosialisasi agar memberi pengertian terhadap masyarakat petani tersebut”²⁶

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya etos kerja dari para petani yang masih belum memahami pentingnya akan pencegahan alih fungsi lahan. Bapak Harsono juga menambahkan bahwa usaha ekonomi pertanian yang pada umumnya berskala kecil masih kalah bersaing dengan usaha ekonomi lain yang berdampak pada masyarakat petani dengan usaha mereka tersebut, pada umumnya masyarakat/petani masih tergantung kepada bantuan pemerintah namun kurang dapat memelihara atau mengembangkannya dikarenakan kurangnya edukasi tentang hal tersebut.²⁷

Dari hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menganalisa bahwa adanya ketertinggalan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat/petani sehingga menghambat proses penerapan teknologi pertanian yang lebih canggih. Minimnya kemampuan dan kinerja aparatur dinas yang seharusnya pihak tersebut memiliki kemampuan yang mumpuni jika ingin menerapkan program LP2B karena akan bersinggungan langsung dengan masyarakat dan semestinya menjadi pihak yang

²⁶ Hasil wawancara dengan Harsonon selaku Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 24 Desember 2016.

²⁷ Hasil wawancara dengan Harsonon selaku Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 24 Desember 2016.

lebih mengetahui untuk dapat membina masyarakat/petani.

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10

Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	PEGAWAI	JUMLAH (Orang)	%
1	PNS	43	74,13
2	HONORER/PHTT	15	25,86
		58	

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur 2016

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

Tabel 3.11

Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menduduki jabatan dan staf Tahun 2016

NO	JABATAN/STAF	JUMLAH (Orang)	%
1	ESELON II	1	2,32
2	ESELON III	4	9,30
3	ESELON IV	21	48,83
4	STAF/PELAKSANA	17	39,53
		43	

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pengisian jabatan struktural Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, 4 orang Kepala Bidang , 8 Orang Kepala Seksi, 2 Orang Kasubag dan 23 Staf Pelaksana serta 7 orang Honorrer.

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/ Pangkat.

Berdasarkan golongan/pangkat dari jumlah pegawai 48 orang yang ada masih ada terdapat pegawai golongan I, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12

Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (Orang)	%
1	IV	5	11,62
2	III	29	67,44
3	II	9	20,93
4	I	0	
		43	

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur 2016

c. Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan

Tabel 3.13

Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	%
1	Strata-1 (S1)	29	67,44
2	Diploma – III	8	18,60
3	SLTA/SMK	6	13,95
4	SMP	0	

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur 2016

Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga pegawai di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki tingkat pendidikan tinggi.

1. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Lokasi Pelaksanaan Program

Dalam menjalankan program barang tentu pasti ada pro dan kontra terhadap di keluarkannya kebijakan pemerintah sampai di jalankannya program tersebut, terlebih jika ada kalangan tertentu yang kurang pengetahuannya dan susah untuk menerima

diadakannya suatu program tersebut, untuk hal ini Bapak Ir. Mahmud selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mengatakan bahwa:

“Artinya setelah adanya Peraturan Daerah No 18 Tahun 2013 ini, para petani - petani yang tadinya tidak mampu menggarap lahannya, setelah adanya perda sekarang telah mendapatkan dana bantuan atau intensif pemerintah seperti bibit, benih padi, pupuk, obat-obat pestisida. Dalam diadakannya program ini tujuan pemerintah agar meningkatkan produksi untuk ketahanan pangan, dan otomatis petani yang dibantu bisa mampu meningkatkan penghasilan dan tidak asal-asalan dalam menanam bibit dan dapat menghasilkan produksi yang meningkat.”²⁸

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa setelah dikeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah No 18 Tahun 2013 ini petani yang awalnya tidak mampu untuk memproduktivitas secara maksimal menjadi terbantu setelah mendapatkan intensif, yang artinya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sangat-sangat bekerja secara maksimal untuk mensukseskan bersama-sama program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini.

2. Pemahaman dan Penerimaan Masyarakat Terkait Program Yang Akan dilaksanakan

Dalam pemahaman dan penerimaan masyarakat terkait program LP2B ini ada yang bisa memahami dan adapula yang masih kurang memahami disebabkan minimnya pengetahuan berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ir. Mahmud

²⁸ Hasil wawancara dengan Ir. Mahmud selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Tanggal 18 November 2016.

selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. (Tanggal 18 November 2016 pukul 13:30 WIB).

“Jika dipresentasikan dari hasil survei, semua petani dapat menerima program ini karena dapat meningkatkan produksi pangan, namun ada beberapa yang belum memahami karena minimnya pengetahuan yang terdapat pada individu masing-masing tersebut. Namun dalam keseluruhannya banyak yang menyambut senang adanya program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut.”²⁹

Dalam menerima kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang Peraturan Daerah No 18 Tahun 2013 ini menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura karena dengan adanya Perda yang dikeluarkan ini segala aspek yang selama ini tengah dipermasalahkan dapat ditemukan jalan keluar yang bisa menyelesaikan permasalahan selama ini.

“Kita sangat antusias sekali dengan dikeluarkan kebijakan pemerintah ini, dan diharapkan agar tetap konsisten untuk dilaksanakan karena tugas pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura ini adalah untuk mempertahankan atau menjaga stabilitas tanaman pangan agar memproduksi tanaman pangan dalam negeri dengan tidak harus mengimport Untuk hal ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura berupaya untuk mencapai apa yang belum tercapai karena semuanya butuh proses dalam hal ini.”³⁰

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura masih dalam proses untuk menjadi pengelola pertanian yang mandiri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar masyarakat bisa lebih maju dan kebutuhan pangan terpenuhi tanpa harus adanya import dari luar negeri dan masyarakat bisa lebih mandiri.

²⁹ Hasil wawancara dengan Ir. Mahmud selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Tanggal 18 November 2016.

³⁰ Hasil wawancara dengan Ir. Akhmad Maushul selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Tanggal 18 November 2016.

“Dibilang belum tercapai ya belum, karena kita selalu ingin meningkatkan setiap tahunnya, jadi kalau ditanya pencapaiannya itu jawabannya belum tercapai maksimal.”³¹

Dalam pencapaiannya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura masih melakukan proses agar mencapai target yang telah ditetapkan seperti yang ditentukan.

4. Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi didalam organisasi pemerintahan membutuhkan adanya pengolahan seluruh transaksi yang berupaya untuk mendukung fungsi manajemen dalam mengambil sebuah keputusan, sistem informasi manajemen pada organisasi pemerintahan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi pemanfaatan sumber daya manusia, dokumen, teknologi dan prosedur yang dibuat oleh pemerintah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura diawali dengan adanya perencanaan sampai pada hasil dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada proses penelitian yang dilakukan penulis, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura cukup transparan dalam menjawab pertanyaan berupa wawancara dan data-data berupa dokumen, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai web yang digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat yaitu dispertan.go.id pada web tersebut (*data terlampir*) penulis menganalisa bahwa informasi yang diberikan belum lengkap dan belum *up to date*.

1. Telepon & Fax akses (0740) 7370053

2. Website

Gambar 3.7

³¹ Hasil wawancara dengan Ir. Mahmud selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Tanggal 18 November 2016.

Website Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber: Dokumentasi Pribadi

3. Email (pertanian@tanjabtimkab.go.id)

Akses fasilitas tersebut disediakan untuk masyarakat agar dapat memudahkan hubungan komunikasi dengan pemerintah, khususnya dalam menjalankan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sudah sangat transparan dan sangat mempermudah dalam menangani urusan tentang hal yang berkaitan dengan alih fungsi lahan maupun Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini. Peneliti telah mewawancarai yaitu ibu Mardiah selaku masyarakat yang menerima pelayanan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tersebut (Tanggal 23 Desember 2016. Pukul 16:00 WIB) bahwasannya :

“Saya selaku penerima pelayanan dan yang selalu berurusan dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merasa pelayanan Dinas ini sangat transparan dan sangat mudah, khususnya bila ingin mengirimkan proposal atau kritik dan saran melalui email resmi dinas maupun web resmi

dinas selalu ditanggapi dengan baik sehingga apapun urusannya selalu terbuka dan dipermudah”³²

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura khususnya pada media online sudah cukup transparan dan sangat dipermudah dalam mengakses apapun yang dibutuhkan masyarakat khususnya petani.

5. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016 diperoleh bahwa:

1. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur .
2. Terbatasnya kemampuan dan aksesibilitas permodalan petani sehingga sulit meningkatkan intensitas usahanya dan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi disekitar.

Tabel 3.14

Sarana dan Prasarana

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Tanah/Gedung	24.000 m ²
2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Unit
3.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Unit

³² Hasil wawancara dengan Mardiah selaku Masyarakat Petani Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 23 Desember 2016.

Sumber :

4.	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional roda 4 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional roda 2	2 Unit 24 Unit
5.	Bibit padi unggul	2 Ton
6.	Fasilitasi pupuk dan Pestisida	200 botol/Kecamatan
7.	Mesin Ketik	10 buah
8.	Meja Kerja	54 buah
9.	Kursi Kerja	50 buah
10.	Kursi Putar	14 buah
11.	Lemari Kayu	20 buah
12.	Lemari Besi	10 buah
13.	TV	3 buah
14.	Jam Dinding	5 buah
15.	LCD	3 buah
16.	Brankas	5 buah
17.	Sound	2 buah
18.	Mocrofon	3 buah
19.	Kamera	3 buah
20.	Filing Cabinet	3 buah

n Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Tanjung Jabung Timur 2016

Berdasarkan data inventaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diperoleh oleh penulis dapat dianalisa bahwa untuk sarana dan prasarana sudah cukup memenuhi, sementara untuk sarana dan prasarana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk masyarakat masih kurang terpenuhi sehingga perlu adanya tambahan infrastruktur saran dan prasarana tersebut, banyaknya 9 titik di 9 kecamatan yang diterapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyebabkan kebutuhan sarana dan prasarana semakin banyak dan perlu disesuaikan dengan penggunaannya agar lahan yang digunakan lebih bermanfaat dan mendapatkan hasil yang sesuai diinginkan.

3. Kondisi Umum Sarana Kerja

Kondisi Umum Sarana kerja merupakan sumber daya asset / modal yang dimiliki Dinas Pertanian terdiri dari :

- a. Asset Tetap : Gedung Kantor Dinas , Balai Benih (BBI) dengan luas 10 hektar
- b. Asset Tidak Tetap : Kendaraan Roda empat 2 unit, Kendaraan roda dua 24 Unit dan Perlengkapan kantor lainnya.

Berdasarkan pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa kelima faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura ini sangat berpengaruh terhadap kinerja aparatur yang menjalankan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini, dimana tanpa adanya faktor ini program tidak akan bisa berjalan sesuai target yang ingin dicapai.